

Peran Sistem Integritas, Sistem Pengendalian Internal, Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas

The Role of Integrity System, Internal Control System, Leadership and Organizational Commitment in the Accountability

Bella Dwi Gina Pitaloka¹ Anita Carolina² Rian Abrori³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received 14 Desember 2022

Revised 26 Desember 2022

Publish 27 Desember 2022

Keywords:

Accountability, Integrity System, Internal Control System, Leadership, Organizational Commitment

Corresponding Author:

anita.carolina@trunojoyo.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.17534>

ABSTRACT

The study sought to examine the impact of integrity system, internal control system, leadership and organizational commitment on accountability in mangrove ecotourism governance. The study was descriptive and quantitative in design, with a questionnaire functioning as the primary data collection tool. A purposive sample method was used to select 161 members of a tourism awareness group that manages mangrove tourism in 4 districts in Madura. SPSS 26 software was used to analyze the information collected. The results revealed a direct significant positive relationship between integrity system and accountability as well as internal control system and accountability. However, the direct link between leadership and organizational commitment and accountability was not supported. This study is beneficial to the government, tourism management and the community, as well as expanding to the literature on the importance of integrity systems, internal control systems, leadership, and organizational commitment in increasing accountability in tourism management.

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh sistem integritas, sistem pengendalian internal, kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan ekowisata mangrove. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif, dengan cara membagikan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih 161 anggota kelompok sadar wisata di 4 kabupaten di Madura. Perangkat lunak SPSS 26 dipilih untuk digunakan dalam menganalisis informasi yang telah dikumpulkan. Hasil yang diperoleh mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif langsung yang signifikan antara sistem integritas dan akuntabilitas serta sistem pengendalian internal dan akuntabilitas. Namun, tidak terdapat hubungan langsung antara kepemimpinan dan akuntabilitas serta komitmen organisasi dan akuntabilitas. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, pengelola pariwisata dan masyarakat sekaligus memperluas literatur mengenai peran sistem integritas, sistem pengendalian internal, kepemimpinan dan komitmen organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pariwisata.



1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian untuk diarahkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan (Kemenparekraf, 2021). UNWTO (2013) mengisyaratkan bahwa salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan pariwisata adalah terdapatnya *sustainable tourism development*. Pernyataan tersebut didasarkan pada konsep pariwisata berkelanjutan yang bermanfaat sebagai stimulator dalam mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pelestarian lingkungan (UNWTO, 2013) dan juga adanya ketergantungan kuat antara lingkungan dengan pariwisata yang menjadikan lingkungan sebagai aset utama dalam menciptakan aktivitas pariwisata (Liu, 2003).

Salah satu prinsip tata kelola dalam pariwisata berkelanjutan adalah akuntabilitas. Definisi akuntabilitas menurut Alam *et al.* (2019) dan Bovens (2007) merupakan sebuah hubungan yang didasarkan pada komitmen untuk dapat bertanggungjawab pada kinerja yang dilakukan sebagai upaya untuk transparan dan adil. Bovens (2010) dan Geer (2009) juga menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi suatu kewajiban terhadap sumber daya yang dikelola. Sehingga, peran penting dari akuntabilitas yakni sebagai informasi ketika mengambil keputusan tertentu (Almquist *et al.*, 2013). Adanya akuntabilitas dalam sektor pariwisata diharapkan dapat mewujudkan sebuah pariwisata berkelanjutan yang responsif dan bertanggungjawab (Tjungadi dan Rahadian, 2020).

Madura merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan julukan sebagai *hidden paradise*, karena keanekaragaman daya tarik wisata, keunikan, kekhasan dan keindahan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan (Arifin, 2017; Febrianti & Hipni, 2021). Ekowisata mangrove merupakan salah satu tujuan wisata alam di Madura yang mempunyai peluang besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hal ini karena destinasi ekowisata mangrove di Madura memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan bentang alam sebab hampir keseluruhan wilayah Madura terdiri dari daerah pesisir yang rentan terjadi bencana alam (Haryanto, 2008). Munculnya ekowisata mangrove ini akan bermanfaat sebagai alternatif yang efektif dalam mengatasi permasalahan eksploitasi lingkungan berlebihan serta dapat menciptakan peningkatan ekonomi masyarakat (Siu *et al.*, 2020).

Ekowisata mangrove digambarkan sebagai suatu pengintegrasian antara kegiatan pariwisata, konservasi dan pemberdayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memperoleh keuntungan atas kegiatan wisata tersebut (Saputra & Agus, 2014). Selain itu juga, ekowisata mangrove diharapkan dapat menciptakan karbon kredit yang menjadi kekuatan besar negara sebesar 75-80% (Priyasmoro, 2021) dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir atas potensi ekonomi berupa hasil hutan, pantai dan perikanan serta wisata alam (Wardhani, 2011). Namun, fakta yang didapatkan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk bersikap akuntabel dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di bidang mangrove. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi pada hutan mangrove Indramayu, Jawa Barat yang menemukan anggaran sebesar 13 miliar dari APBN dilakukan tindakan penyelewengan (Rahman, 2021) serta masih maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh pengelola wisata yang terjadi di hutan mangrove Langsa, Aceh yakni sebanyak tujuh orang diamankan oleh kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban (Felisiani, 2021).

Pada kenyataannya, keterlibatan masyarakat pada pengelolaan wisata menjadi hal utama yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan ke arah yang lebih akuntabel (Junaid *et al.*, 2019). Adanya keterlibatan aktif dari masyarakat akan berguna dalam menciptakan suatu peran pembangunan dan pengembangan pariwisata (Ira & Muhamad, 2019). Pernyataan tersebut mengarah pada terbentuknya kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang diharapkan dapat bersikap profesional saat melaksanakan tugas untuk mencapai akuntabilitas. Dari lensa *stewardship theory*, tata kelola yang baik dapat dikaitkan dengan hubungan yang selaras antara tanggungjawab dari anggota organisasi dengan keberhasilan organisasi dan kepuasan pihak eksternal (Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991). Teori ini berlandaskan pada *steward* yang diatur perilakunya oleh organisasi agar memposisikan kepentingan prinsipal lebih tinggi daripada kepentingan pribadi (Donaldson *et al.*, 1997). Oleh karena itu, anggota organisasi cenderung akan berusaha secara maksimal dan penuh tanggungjawab dalam mencapai tujuan

perusahaan (Donaldson & Davis, 1991).

Alam *et al.* (2019) dan Bovens (2007) menekankan bahwa pengelola organisasi sebagai *steward* mempunyai tanggungjawab untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah organisasi. Akuntabilitas yang baik dalam sebuah organisasi dapat tercapai apabila organisasi memiliki sistem integritas yang kuat (Alam *et al.*, 2019; Ardiani, 2019; Atan *et al.*, 2017; Mintrop, 2012), sistem pengendalian internal yang baik (Alam *et al.*, 2019; COSO, 2013; Nurjaman *et al.*, 2018; Puspa & Prasetyo, 2020; Widyatama *et al.*, 2017), pemimpin yang mempunyai karakteristik kepemimpinan yang baik (Alam *et al.*, 2019; Atan *et al.*, 2017; Burhanuddin *et al.*, 2020; Gbrevbie *et al.*, 2017; Geer *et al.*, 2008; Marlina *et al.*, 2021) dan anggota organisasi yang berkomitmen tinggi pada organisasi (Hardiningsih *et al.*, 2020; Mowday *et al.*, 1979; Suryani & Suprasto, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya pada beberapa aspek. Pertama, terdapat pengembangan variabel dalam penelitian ini. Kedua, penelitian ini berfokus pada ekowisata mangrove di Madura yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia sebagai respon dari perubahan iklim dan kerusakan alam. Ketiga, pemilihan ekowisata mangrove di Madura dikarenakan terdapatnya potensi pengembangan wisata namun masih terdapat celah kurang maksimalnya pengelolaan ekowisata. Yang keempat, dipilihnya ekowisata mangrove di Madura dalam penelitian ini merupakan novelty karena penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada akuntabilitas pemerintah desa (Ardiani, 2019; Burhanuddin *et al.*, 2020; Hardiningsih *et al.*, 2020; Marlina *et al.*, 2021; Pahlawan *et al.*, 2020; Puspa & Prasetyo, 2020; Suryani & Suprasto, 2021; Widiawaty, 2019; Widyatama *et al.*, 2017), pemerintah daerah (Alam *et al.*, 2019; Nurjaman *et al.*, 2018; Sukarno *et al.*, 2020) atau organisasi non-profit (Atan *et al.*, 2017; Geer *et al.*, 2008; Mintrop, 2012).

2. TELAAH LITERATUR

Teori *stewardship* adalah teori yang muncul dari psikologi dan sosiologi organisasi sebagai sebuah pandangan baru dalam membahas pengelolaan organisasi di mana manajemen tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi melainkan lebih memprioritaskan kepentingan bersama (Donaldson & Davis, 1991). Gambaran dari teori ini yakni ketika pihak *steward* bekerja pada kepentingan organisasi maka keberhasilan organisasi akan tercapai dan pemenuhan kebutuhan pribadi seorang *steward* akan ikut terpenuhi (Donaldson *et al.*, 1997). Pendekatan teori *stewardship* pada penelitian ini dapat menjelaskan bahwa anggota pokdarwis selaku pengelola akan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan wisata melalui sikap jujur, prosedural, kepemimpinan yang baik serta tingginya komitmen dari masing-masing individu sehingga akuntabilitas organisasi dapat terwujud secara maksimal.

Sistem integritas menurut Aulich (2011) adalah rangkaian praktik berkesinambungan dari fundamental organisasi dalam mewujudkan kepentingan bersama yang lebih akuntabel dan transparan. Matsiliza & Zonke (2017) juga menyatakan bahwa sistem integritas dijadikan pilar terkait aturan hukum yang penerapannya dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga, gambaran dari sistem integritas sendiri yaitu sebuah tindakan tunduk dan patuh pada prinsip moral atau etika (Abioye & Odediji, 2021). Alam *et al.* (2019) menyatakan apabila dalam sebuah organisasi terdapat sistem integritas akan berguna dalam membangun suatu kepercayaan. Namun jika tidak, maka dapat menimbulkan tindakan penyalahgunaan yang merusak kontrol dari tata kelola terkait dengan akuntabilitas organisasi (Matsiliza & Zonke, 2017).

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab atau kewajiban seseorang maupun organisasi yang menjadi implementasi atas kesiapannya dalam menjelaskan dan membenarkan apa yang telah diputuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku individu maupun penilaian atas kualitas organisasi (Alam *et al.*, 2019; Bovens, 2007, 2010; Geer, 2009). Hal ini karena akuntabilitas dijadikan sebagai proses untuk mendapatkan jawaban perihal pemanfaatan sumber daya yang telah digunakan (Almquist *et al.*, 2013). Sejalan dengan teori *stewardship* bahwa terciptanya hubungan baik antara keberhasilan organisasi dengan tujuan yang diharapkan oleh pihak berkepentingan dapat diwujudkan melalui pemaksimalan kinerja secara jujur dan meletakkan kepercayaan pada diri *steward* ketika memaksimalkan sumber daya yang ada (Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991). Sistem integritas yang merupakan pilar pengelolaan organisasi dapat menjadi pendorong utama tercapainya akuntabilitas, sebagaimana telah dinyatakan dalam penelitian Alam *et al.* (2019), Ardiani (2019), Atan *et al.* (2017) dan Mintrop (2012). Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut telah membuktikan bahwa sistem integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, sehingga hipotesis penelitian ini:

H₁: Sistem integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Jaminan dalam mencapai tujuan organisasi mengenai kegiatan operasi, pelaporan dan kepatuhan yang berfokus pada terwujudnya efisiensi operasional merupakan definisi dari sistem pengendalian internal menurut AICPA (2008) dan COSO (2013). Definisi tersebut didasarkan pada suatu organisasi yang akan mengalami banyak risiko yang tidak dapat diduga sebelumnya (Alam *et al.*, 2019). Sehingga, dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kegiatan operasional organisasi yang berjalan efektif dan efisien, mengurangi risiko yang terjadi dan menciptakan *good corporate governance* yakni akuntabilitas (COSO, 2013). Akuntabilitas adalah mekanisme pertanggungjawaban organisasi atau individu terkait dengan penjelasan atas perilaku yang diputuskan ketika menggunakan sumber daya yang ada sebagai syarat bertindak transparan, adil dan merata (Alam *et al.*, 2019; Bovens, 2007, 2010; Geer, 2009). Pernyataan tersebut juga menggambarkan pentingnya akuntabilitas dalam menjadi penentu keputusan terbaik bagi pihak yang berkepentingan (Almquist *et al.*, 2013). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menitikberatkan pada pengelolaan organisasi melalui penciptaan jalinan kuat antara pencapaian organisasi dan kepuasan para pihak dalam memaksimalkan penatalayanan yang baik (Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991).

Sistem pengendalian internal mempunyai peran yang sangat krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dalam sebuah organisasi (Alam *et al.*, 2019). Sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik dapat memastikan bahwa organisasi telah berjalan dalam jalur yang semestinya dan pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi tidak melakukan sebuah tindakan *misconduct* (COSO, 2013) sehingga perusahaan menjadi *accountable* (Alam *et al.*, 2019; Nurjaman *et al.*, 2018; Puspa & Prasetyo, 2020; Widyatama *et al.*, 2017). Maknanya adalah semakin baik sistem pengendalian internal sebuah organisasi maka akan semakin baik pula akuntabilitasnya. Namun, Pahlawan *et al.* (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas. Dengan adanya inkonsistensi dalam penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini:

H₂: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Kepemimpinan didefinisikan sebagai perilaku memengaruhi orang lain untuk patuh terhadap apa yang perlu dilakukan (Winston & Patterson, 2006) atau juga merupakan individu yang mampu bertanggungjawab atas organisasinya (Hogan & Kaiser, 2005). Sehingga, interpretasi dari suatu kepemimpinan adalah hubungan antara pengikut, pemimpin dan interaksi keduanya (Graen & Bien, 1995) yang muncul akibat adanya hubungan interpersonal (Jendia, 2015). Hubungan tersebut memberikan sebuah kejelasan mengenai tanggungjawab pemimpin kepada organisasi dan pengikutnya (Kraines, 2001) yang menjadikan keterampilan kepemimpinan berguna di seluruh pengaturan organisasi (Leithwood, 2001). Dibuktikan ketika kepemimpinan dilakukan secara efektif akan berdampak pada perbaikan kerja tim dan hasil positif organisasi (Alam *et al.*, 2019; Greenfield, 2007; Hogan & Kaiser, 2005). Apabila pemimpin berfokus pada kredibilitas, maka dapat menciptakan karismatik kepemimpinan yang dihargai dan dihormati oleh pengikutnya sebagai bentuk pencapaian akuntabilitas (Hogan & Kaiser, 2005; Leithwood, 2001; Winston & Patterson, 2006). Gberevbie *et al.* (2017) juga menyatakan bahwa pencapaian akuntabilitas dapat terwujud ketika pemimpin bertindak etis saat melaksanakan tanggungjawabnya. Karena, akuntabilitas sendiri digunakan sebagai wujud legalitas organisasi dan berperan penting dalam mencapai *good corporate governance* (Alam *et al.*, 2019; Bovens, 2007, 2010; Geer, 2009) yang sangat relevan dengan pernyataan Almquist *et al.* (2013) jika akuntabilitas dibutuhkan sebagai pembenaran data dan fakta agar menghasilkan keputusan yang tepat.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa seseorang atau dalam hal ini yakni pemimpin akan selalu melakukan pemaksimalan kinerja bagi organisasinya (Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991). Karena, ketika pemimpin dapat menyelaraskan tujuan dan mempertahankan kepemimpinan yang efektif dapat mendorong serta meningkatkan penciptaan akuntabilitas organisasi (Alam *et al.*, 2019). Disamping itu juga, adanya pengembangan karakteristik kepemimpinan melalui keselarasan visi, misi dan nilai organisasi menjadi pendorong akuntabilitas tersebut dapat dicapai. Pemimpin dengan karakteristik kepemimpinan yang baik akan berorientasi untuk menciptakan organisasi yang akuntabel. Alam *et al.* (2019), Atan *et al.* (2017), Burhanuddin *et al.* (2020), Geer *et al.* (2008) dan Marlina *et al.* (2021) sependapat bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penciptaan akuntabilitas. Namun di sisi lain, Widiawaty (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak dipengaruhi oleh kepemimpinan. Sehingga, hipotesis penelitian ini:

H₃: Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Komitmen organisasi adalah sebuah peluang kecil dari diri seseorang untuk meninggalkan organ-

isasi karena telah mendedikasikan dirinya secara utuh di suatu organisasi (Allen & Meyer, 1990; Mowday *et al.*, 1979). Hal ini karena komitmen organisasi menjadi cerminan atas tindakan individu yang lebih memilih untuk tetap berada dalam organisasi dengan harapan mencapai pemaksimalan tujuan melalui pihak yang telah berkomitmen kuat (Allen & Meyer, 1996; Mada *et al.*, 2017). Hubungan kuat yang terjalin antara individu dan organisasi akan berdampak pada perilaku individu yang secara sukarela memberikan apa yang ada pada dirinya untuk dikontribusikan dalam pemenuhan tujuan organisasi (Mowday *et al.*, 1979). Adanya kesediaan secara sukarela ini lah yang memudahkan organisasi dalam mencapai akuntabilitas. Karena, akuntabilitas dijadikan sebagai pemantauan perilaku individu agar terhindar dari tindakan konsentrasi kekuasaan dan bentuk pengungkapan secara transparan atas pengelolaan sumber daya (Alam *et al.*, 2019; Bovens, 2007, 2010; Geer, 2009). Selain itu juga, akuntabilitas bermanfaat sebagai suatu rangkaian penjelasan dan pembenaran atas tanggungjawab yang diputuskan (Almquist *et al.*, 2013).

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa seseorang lebih cenderung mengutamakan tujuan organisasi daripada tujuan pribadinya guna memaksimalkan kesejahteraan bersama (Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991). Dapat dilihat apabila seseorang yang berada di dalam organisasi lebih memilih untuk berkomitmen tinggi, maka akan berdampak pada kemudahan organisasi untuk meraih akuntabilitasnya. *Steward* akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan organisasi yang akuntabel. Hardiningsih *et al.* (2020) dan Suryani & Suprasto (2021) telah membuktikan bahwa akuntabilitas dapat tercapai apabila anggota organisasi mempunyai komitmen terhadap organisasi. Sedangkan, Sukarno *et al.* (2020) dan Widiawaty (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Sehingga, hipotesis penelitian ini:

H₄: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang memperoleh sumber data dari data primer melalui pembagian kuesioner secara langsung kepada responden (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ekowisata mangrove di Madura yang terdaftar pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga beserta total keseluruhan pokdarwis yang dibentuknya. Teknik *purposive sampling* dipilih untuk digunakan dalam pengambilan sampel yang menghasilkan sampel sebanyak 4 lokasi ekowisata mangrove dan 161 anggota pokdarwis. Pengukuran variabel penelitian tersebut dilakukan melalui skala *likert* dari angka 1 hingga 5 guna memeriksa seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan. Terkait dengan analisis data dilakukan melalui uji kualitas data, uji asumsi klasik serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 26. Berikut adalah tabel 1 mengenai definisi operasional beserta indikatornya:

Tabel 1 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran

Variabel	Definisi	Indikator	Acuan
Sistem Integritas (X ₁)	Seperangkat kebijakan yang ditetapkan organisasi dalam menciptakan transparan dan akuntabel	Kepatuhan pada peraturan Budaya organisasi Whistleblowing	Aulich (2011), Matsiliza & Zonke (2017) dan Alam <i>et al.</i> (2019)
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Jaminan proses mencapai tujuan organisasi	Lingkungan pengendalian Penilaian risiko Aktivitas pengendalian Informasi dan komunikasi Pengawasan	COSO (2013)
Kepemimpinan (X ₃)	Sebuah kemampuan dalam memengaruhi orang lain	Tanggungjawab etis Panutan Kepedulian terhadap nilai	Hogan & Kaiser (2005), Winston & Patterson (2006), Jendia (2015) dan Alam <i>et al.</i> (2019)

Komitmen Organisasi (X ₄)	Suatu bentuk pengabdian kepada organisasi	Perasaan setia atau bangga Bekerja melebihi dari yang diminta Kesesuaian nilai Peduli nasib kedepannya	Mowday <i>et al.</i> (1979) dan Mada <i>et al.</i> (2017)
Akuntabilitas (Y)	Dasar suatu hubungan untuk memberikan kejelasan dalam bertindak adil	Kesesuaian prosedur Kecukupan informasi Kejujuran dan keterbukaan	Bovens (2007) dan Alam <i>et al.</i> (2019)

Sumber: Penelitian terdahulu diolah, 2022

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji kualitas data terkait dengan uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan telah memenuhi kriteria bahwa nilai r hitung $> 0,1547$ sehingga dinyatakan valid. Begitu juga dengan uji reliabilitas yang menunjukkan *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ sehingga data penelitian bersifat reliabel. Uji asumsi klasik mengenai uji normalitas diperoleh nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0,059 dengan signifikansi 0,200 yang menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 diperoleh nilai *tolerance* melebihi 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Dan terkait hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sistem Integritas (X ₁)	0,568	1,759	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,679	1,474	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepemimpinan (X ₃)	0,590	1,696	Tidak terjadi multikolinearitas
Komitmen Organisasi (X ₄)	0,536	1,866	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2022

Uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel sistem integritas dengan nilai koefisien 0,164, variabel sistem pengendalian internal dengan nilai koefisien 0,249, kepemimpinan dengan nilai koefisien 0,017 dan komitmen organisasi dengan nilai koefisien 0,081 apabila mengalami kenaikan sebesar 1 satuan menyebabkan variabel akuntabilitas naik sebesar nilai masing-masing koefisien tersebut. Untuk hasil uji *Adjusted R Square* (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,583 yang menandakan bahwa 58,3% dari variabel akuntabilitas dapat dijelaskan oleh variabel sistem integritas, sistem pengendalian internal, kepemimpinan dan komitmen organisasi.

Tabel 3 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients			t hitung	Sig.	Ket.
	B	Std. Error				
(Constant)	1,215	1,096				
Sistem Integritas (X ₁)	0,164	0,078	2,118	0,036	H ₁ diterima	
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,249	0,024	10,338	0,000	H ₂ diterima	
Kepemimpinan (X ₃)	0,017	0,087	0,197	0,844	H ₃ ditolak	

Komitmen Organisasi (X_4)	0,081	0,075	1,084	0,280	H_4 ditolak
t-tabel 1,975					

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil analisis variabel sistem integritas menunjukkan $2,118 > 1,975$ dengan signifikansi 0,036 yang menyatakan bahwa sistem integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Kompleksnya proses pengelolaan ekowisata mangrove yang memerlukan keterlibatan masyarakat, mengharuskan organisasi untuk dapat menciptakan sistem integritas sebagai pondasi kuat dalam menyelaraskan tingkah laku pengelola sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Sistem integritas merupakan rangkaian kebijakan yang dibuat untuk mewujudkan tujuan organisasi ke arah yang lebih akuntabel dan transparan (Aulich, 2011). Ketika sebuah organisasi memiliki sistem integritas yang baik, maka dapat memberikan kepercayaan kepada para pihak yang berkepentingan (Alam *et al.*, 2019). Namun sebaliknya, tidak terdapatnya sistem integritas yang baik dapat merusak kontrol tata kelola khususnya akuntabilitas organisasi (Matsiliza & Zonke, 2017). Hal ini yang menjadikan akuntabilitas sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menggambarkan kondisi riil suatu pengelolaan sumber daya (Almquist *et al.*, 2013; Bovens, 2007, 2010) serta menjadi wujud implementasi dari sikap sukarela untuk mengungkapkan hasil secara transparan (Abioye & Odediji, 2021; Alam *et al.*, 2019; Geer, 2009). Tercermin pada perilaku anggota pokdarwis yang senantiasa mematuhi segala peraturan melalui sikap jujur ketika melaksanakan tanggungjawabnya yang dapat dilihat dari hasil jawaban responden berada dalam kriteria tinggi. Penelitian ini mengonfirmasi teori *stewardship* bahwa terwujudnya tujuan serta harapan organisasi dan pihak berkepentingan dilakukan melalui pemaksimalan kinerja secara transparan dan jujur serta meyakini apapun yang dilakukan demi organisasi akan berdampak pada pemenuhan kepentingan pribadi (Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991). Penelitian ini mendukung penelitian dari Alam *et al.* (2019), Ardiani (2019), Atan *et al.* (2017) dan Mintrop (2012) yang menyatakan bahwa sistem integritas memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas.

Analisis data sistem pengendalian internal menunjukkan t hitung $10,338 > t$ tabel 1,975 dengan signifikansi 0,000 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Banyaknya risiko yang mungkin terjadi di dalam suatu organisasi, membuat organisasi harus dapat menerapkan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan (Alam *et al.*, 2019). Tergambar dari sistem pengendalian internal yang menjadi komponen penting dari suatu organisasi dalam memberikan perlindungan terhadap segala hal yang tidak diinginkan terjadi (COSO, 2013). AICPA (2008) dan COSO (2013) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan sebuah pencapaian dari kegiatan operasional yang efektif, pelaporan yang baik serta kepatuhan terhadap kebijakan. Dapat dimaksudkan pula, jika sistem pengendalian internal diterapkan dalam proses pengelolaan ekowisata mangrove, maka diharapkan dapat menciptakan kelangsungan kegiatan operasional wisata yang berjalan secara efisien melalui penekanan risiko. Disamping itu juga, kebutuhan akan adanya sikap akuntabel pada saat melaksanakan tanggungjawab turut menentukan arah kebijakan apa yang akan dipilih oleh suatu organisasi (Almquist *et al.*, 2013). Alam *et al.* (2019), Bovens (2007, 2010) dan Geer (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas dijadikan sebagai kewajiban dalam mengungkapkan hasil secara transparan. Hal ini terjadi karena adanya jalinan kuat antara komponen organisasi dengan keterbukaan pihak yang bekerja di dalamnya yang berdampak pada terwujudnya keberhasilan organisasi sesuai dengan harapan bersama. Penelitian ini mengonfirmasi teori *stewardship* dari Donaldson *et al.* (1997) dan Donaldson & Davis (1991) yang mengatakan bahwa terwujudnya keberhasilan bersumber dari jalinan yang dibentuk oleh setiap komponen penyusun organisasi dan keselarasan tindakan para pihak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Alam *et al.* (2019), Nurjaman *et al.* (2018), Puspa & Prasetyo (2020) dan Widyatama *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Namun tidak mendukung penelitian Pahlawan *et al.* (2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Hasil analisis variabel kepemimpinan menunjukkan nilai t hitung $< t$ tabel sebesar 0,197 dengan signifikansi 0,844 yang menyatakan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Hal ini disebabkan karena praktik kepemimpinan tidak selalu relevan dengan harapan yang diinginkan untuk berfokus pada kepentingan organisasi saja (Winston & Patterson, 2006). Tergambar dari sifat lahiriah manusia yang bersikap sesuai dengan apa yang mereka anggap baik dan benar walaupun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan orang lain. Padahal, kepemimpinan dalam suatu organisasi harus

bisa didasarkan pada tindakan perilaku etis (Gberevbie *et al.*, 2017) yang dapat secara mudah menciptakan perilaku patuh dan adanya perbaikan kerja tim (Hogan & Kaiser, 2005; Leithwood, 2001; Winston & Patterson, 2006). Pengelolaan ekowisata mangrove yang erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat (pokdarwis) memerlukan sosok pemimpin yang berperilaku etis ketika mencapai tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan, kepemimpinan dianggap sebagai sikap tanggungjawab individu terhadap organisasi (Hogan & Kaiser, 2005) yang mampu membuat organisasi tumbuh dan berkembang secara pesat (Greenfield, 2007). Selain itu juga, kepemimpinan dianggap sebagai implementasi dari suatu pengelolaan organisasi (Jendia, 2015; Kraines, 2001) melalui ikatan antara pemimpin, pengikut dan hubungannya (Graen & Bien, 1995) yang menyebabkan suatu organisasi harus dapat mengembangkan karakteristik kepemimpinan efektif sebagai usaha dalam mencapai akuntabilitas (Alam *et al.*, 2019). Hal tersebut karena akuntabilitas menjadi bagian utama dari sebuah kewajiban organisasi yang akuntabel (Alam *et al.*, 2019; Bovens, 2007, 2010) dan juga menjadi gambaran informasi yang relevan atas sumber daya (Almquist *et al.*, 2013; Geer, 2009). Penelitian ini tidak dapat mengonfirmasi teori *stewardship* dari Donaldson *et al.* (1997) dan Donaldson & Davis (1991) yang menyatakan jika kepemimpinan yang berfokus pada tujuan organisasi melalui penciptaan karismatik kepemimpinan mampu menciptakan akuntabilitas suatu organisasi. Karena, pemimpin dalam pengelolaan organisasi dapat berpeluang belum sepenuhnya mampu untuk selalu menyelaraskan tujuannya pada kepentingan organisasi. Hal ini sesuai dengan hasil jawaban responden terkait indikator perilaku etis yang dapat terus dikonsistensikan dan ditingkatkan demi pencapaian akuntabilitas melalui wujud perilaku pemimpin dan pengikut yang beriringan mencapai tujuan. Penelitian ini mendukung penelitian dari Widiawaty (2019) yang mengatakan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Alam *et al.* (2019), Atan *et al.* (2017), Burhanuddin *et al.* (2020), Geer *et al.* (2008) dan Marlina *et al.* (2021) yang menyatakan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.

Analisis data variabel komitmen organisasi menunjukkan nilai $1,084 < 1,975$ dengan signifikansi 0,280 yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Beragamnya latar belakang kehidupan anggota pokdarwis dapat menyebabkan tingkat komitmen mereka terhadap konsistensi pengelolaan ekowisata mangrove menjadi berbeda-beda sesuai dengan faktor eksternal yang memengaruhinya. Padahal, komitmen organisasi dianggap sebagai peluang kecil bagi individu untuk dapat meninggalkan organisasi (Allen & Meyer, 1990) dan merupakan kaitan emosional atas keterlibatan aktif individu terhadap organisasi (Allen & Meyer, 1990; Mowday *et al.*, 1979) yang dapat diukur melalui keyakinan dalam diri individu dengan terlibat di setiap tugas dan tanggungjawab untuk memajukan organisasi (Mowday *et al.*, 1979). Tidak berpengaruhnya komitmen organisasi terhadap akuntabilitas ini disebabkan karena anggota pokdarwis memiliki prinsip nilai kerja lain yang lebih sesuai dengan kondisi mereka di luar pengelolaan ekowisata mangrove sehingga membuat komitmen mereka harus terbagi sesuai banyaknya organisasi yang diikuti ataupun harus mengorbankan salah satu komitmen demi komitmen lain yang justru menyebabkan capaian tujuan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan secara baik. Sebenarnya, jika terdapat komitmen organisasi yang utuh dalam organisasi sangat diharapkan menjadi wujud capaian tujuan melalui komitmen pihak yang terlibat di dalamnya agar bisa melakukan pemaksimalan kinerja dan berfokus pada kepentingan bersama (Allen & Meyer, 1996; Mada *et al.*, 2017). Karena, jika kinerja dari anggota pokdarwis tidak dimaksimalkan secara baik dapat menghambat tingkat akuntabilitas pengelolaan ekowisata mangrove yang masih sangat memerlukan keterlibatan aktif pengelola melalui komitmen mereka untuk terus berkontribusi pada pengembangan wisata. Akuntabilitas dibutuhkan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan dalam menekan pemusatan kekuasaan yang menimbulkan perilaku menyimpang (Bovens, 2007, 2010) serta bertujuan untuk melihat seberapa efektif penggunaan sumber daya organisasi (Alam *et al.*, 2019; Almquist *et al.*, 2013; Geer, 2009). Penelitian ini tidak dapat mengonfirmasi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa individu akan selalu memfokuskan dirinya pada kepentingan organisasi dengan cara melakukan pemaksimalan usaha karena telah mengikatkan dirinya pada organisasi tertentu berdasarkan pengaturan sikap yang telah ditentukan (Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991). Penelitian ini mendukung penelitian dari Sukarno *et al.* (2020) dan Widiawaty (2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Hardiningsih *et al.* (2020) dan Suryani & Suprasto (2021) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem integritas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ekowisata mangrove di Madura, sedangkan kepemimpinan dan komitmen organisasi menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan ekowisata mangrove. Hal tersebut dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata mangrove serta risiko besar yang mungkin terjadi sangat membutuhkan adanya sistem integritas dan sistem pengendalian internal yang berkesinambungan sebagai instrumen penting di dalam mengatur segala tingkah laku pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh pemerintah, pengelola pariwisata dan masyarakat di sekitar lokasi wisata untuk mewujudkan akuntabilitas dalam tata kelola pariwisata. Selain itu, penelitian ini dapat mempeluas literatur mengenai tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Terkait keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup objek penelitian yang masih baru dan sedikit di teliti sehingga populasi dan sampel yang diperoleh terbatas. Sehingga, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan populasi dan sampel dengan cara melakukan perbandingan lokasi ekowisata mangrove di Madura dengan di luar Madura atau juga dapat membandingkan objek penelitian ekowisata mangrove dengan wisata lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abioye, R. O., & Odediji, E. I. (2021). Integrity and Accountability as Instruments for Good Governance in Nigeria. *African Journal Online (AJOL)*, 4(1), 202-220.
- Alam, M. M., Said, J., & Aziz, M. A. A. (2019). Role of Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices on the Accountability Practices in the Public Sectors of Malaysia. *Social Responsibility Journal*, 15(7), 955-976. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2017-0051>
- American Institute of Chartered Public Accountants (AICPA). (2008). *Sistem Pengendalian Internal*.
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63, 1-18.
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1996). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity. *Journal of Vocational Behavior*, 49(43), 252-276. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8980084>
- Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public Sector Governance and Accountability. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(7-8), 479-487. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005>
- Arcana, K. T. P., Pranatayana, I. B. G., Suprpto, N. A., Sutiarto, M. A., Semara, I. M. T., Candrawati, N. L. P. A., & Suri, M. (2021). Tata Kelola Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tihingan Kabupaten Klungklung. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), 36-45. <https://doi.org/10.22334/jam.v1i1.5>
- Ardiani, S. (2019). Pengaruh Integritas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 159-170.
- Arifin, S. (2017). Digitalisasi Pariwisata Madura. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 53-60. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.2835>
- Atan, R., Md. Mahmudul, A., & Jamalia, S. (2017). Practices of corporate integrity and accountability of non-profit organizations in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 1-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2016-0260>
- Aulich, C. (2011). Integrity Agencies as One Pillar of Integrity and Good Governance. *Public Policy and Administration*, 26(3), 41-52.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946-967. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119>
- Burhanuddin, Syarifuddin, A., & Iqbal. (2020). Analisis Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan, Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *Ilmiah Pascasarjana STIE YPUP*, 1(1), 48-54.
- COSO. (2013). Internal Control-Integrated Framework. In *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*. <https://www.coso.org/Pages/ic.aspx>

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Donaldson, L., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.4324/9781315261102-29>
- Febrianti, N., & Hipni, M. (2021). Dinamika Pengembangan Pariwisata Halal di Madura Perspektif Sosio Legal. *Kabilah: Journal of Social Community*, 6(2), 1–15.
- Felisiani, Theresia. (2021). 19 Juni. *Terlibat Pungli di Hutan Mangrove, Tujuh Orang Diamankan ke Polres Langsa*. Melalui (<https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/19/terlibat-pungli-di-hutan-mangrove-tujuh-orang-diamankan-ke-polres-langsa>). Diakses pada 26 Mei 2022.
- Gberevbie, D., Joshua, S., Oluye, N. E., & Oyeyemi, A. (2017). Accountability for Sustainable Development and The Challenges of Leadership in Nigeria, 1999-2015. *Sage Journal Open*, 7(4). <https://doi.org/10.1177/2158244017742951>
- Geer, B. W. (2009). *Nonprofit Accountability: an Institutional and Resource Dependence Lens on Conformance and Resistance*. University of Pittsburgh at Johnstown.
- Geer, B. W., Maher, J. K., & Cole, M. T. (2008). Managing Nonprofit Organizations: The Importance of Transformational Leadership and Commitment to Operating Standards for Nonprofit Accountability. *Public Performance & Management Review*, 32(1), 51–75. <https://doi.org/10.2753/pmr1530-9576320103>
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graen, G. B., & Bien, M. U. (1995). Relationship-Based Approach to Leadership: Development of Leader-Member Exchange (LMX) Theory of Leadership Over 25 Years: Applying a Multi-Level Multi-Domain Perspective. *Leadership Quarterly*, 6(2), 219–247.
- Greenfield, D. (2007). The Enactment of Dynamic Leadership. *Leadership in Health Services*, 20(3), 159–168. <http://dx.doi.org/10.1108/17511870710764014>
- Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 223–233. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.223>
- Haryanto, R. (2008). Rehabilitasi Hutan Mangrove: Pelestarian Ekosistem Pesisir Pantai dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 14(2), 148–160. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/123>
- Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2005). What We Know About Leadership. *Review of General Psychology*, 9(2), 169–180. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.9.2.169>
- Ira, W. S., & Muhamad, M. (2019). Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Magelang). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 124–135. <https://doi.org/10.22146/jpt.43802>
- Jendia, C. (2015). Leadership, Accountability, and Integrity: An African Perspective. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 24(2), 164–176.
- Junaid, I., Mansyur, & Uleng, A. (2019). Implementasi Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 110–123. <https://doi.org/10.22146/jpt.46518>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *ISCT: Mendorong Percepatan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia*. Diakses pada 22 Maret 2022. Melalui (<https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/istc-mendorong-percepatan-pariwisata-berkelanjutan-di-indonesia>).
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Destinasi Wisata Berbasis Sustainable-Tourism di Indonesia*. Diakses pada 22 Maret 2022. Melalui (<https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia>).
- Kraines, G. A. (2001). Are You L.E.A.D.ing Your Troops. *Journal Strategy & Leadership*, 29(2), 29–33.
- Leithwood, K. (2001). School Leadership in the Context of Accountability Policies. *International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice*, 4(3), 217–235. <https://doi.org/10.1080/13603120110057082>

- Liu, Z. (2003). Sustainable Tourism Development: A Critique. *Journal of Sustainable Tourism*, 11(6), 459–475. <https://doi.org/10.1080/09669580308667216>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Putri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Matsiliza, N., & Zonke, N. (2017). Accountability and Integrity as Unique Column of Good Governance. *Public and Municipal Finance*, 6(1), 75–82. [https://doi.org/10.21511/pmf.06\(1\).2017.08](https://doi.org/10.21511/pmf.06(1).2017.08)
- Mintrop, H. (2012). Bridging accountability obligations, professional values and (perceived) student needs with integrity. *Journal of Educational Administration*, 50(5), 695–726. <https://doi.org/10.1108/09578231211249871>
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14, 224–247.
- Nurjaman, K., Tisnawati Sule, E., & Effendi, N. (2018). Accountability in Local Government: Role of Internal Control System, Leadership and Organizational Culture. *International Journal of Business, Economics and Law*, 16(5), 235–241.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Priasmoro, Muhammad Radityo. (2021). 3 Maret. *Potensi Hutan Mangrove Indonesia Sumbang Karbon Kredit 80 Persen Dunia*. hal 1-2. <https://www.liputan6.com/news/read/4497549/potensi-hutan-mangrove-indonesia-sumbang-karbon-kredit-80-persen-dunia>. Diakses pada 22 Maret 2022.
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 102–108. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4884>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Rahman, Handhika. (2021). *Duit APBN Rp 13M untuk Penanaman Mangrove di Indramayu Diduga Dikorupsi, Ini Kata Kejari Indramayu*. Melalui (<https://jabar.tribunnews.com/2021/12/30/duit-apbn-rp-13-m-untuk-penanaman-mangrove-di-indramayu-diduga-dikorupsi-ini-kata-kejari-indramayu>). Diakses pada 9 Februari 2022.
- Saputra, S. E., & Agus, S. (2014). Potensi Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*, 2(2), 49–60. <https://doi.org/10.23960/jsl2249-60>
- Siu, M. G. L., Amanah, S., & Santoso, N. (2020). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang. *Jurnal Tengkuwang*, 10(1), 62–74. <https://doi.org/10.26418/jt.v10i1.40663>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (19th ed.)*. ALFABETA, CV.
- Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 110–117. <https://doi.org/10.32400/iaj.27981>
- Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2011–2027. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p11>
- Tjungadi, M. A. H., & Rahadian, Y. (2020). Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 241–264.
- UNWTO. (2013). *Sustainable Tourism for Development Guidebook*. Madrid (Spain).
- Wardhani, M. K. (2011). Kawasan Konservasi Mangrove: Suatu Potensi Ekowisata. *Jurnal Kelautan*, 4(1), 60–

79. <https://journal.trunojoyo.ac.id/jurnalkelautan/article/view/891>

- Widiawaty, N. A. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1-20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Winston, B. E., & Patterson, K. (2006). An Integrative Definition of Leadership. *International Journal of Leadership Studies*, 1(2), 6-66.